

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah daerah mengenai program infrastruktur perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edwards III khususnya faktor-faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berlangsung optimal melalui pendekatan faktor-faktor implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dapat diatasi dengan pemenuhan tuntutan dan kebutuhan yang menunjang implementasi kebijakan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam peningkatan infrastruktur perdesaan di Desa Citapen dilakukan seoptimal mungkin agar tercapainya infrastruktur yang diharapkan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan oleh para pelaksana desa Masyarakat Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat belum optimal, yaitu minimnya waktu dalam mensosialisasikan kebijakan dengan masyarakat desa, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, wujud kinerja aparat yang belum optimal dalam berkoordinasi serta kesulitan dalam memberikan insentif material yang memadai, dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan infrastruktur perdesaan pemerintah desa belum sesuai dengan tugasnya.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, pemerintah daerah, infrastruktur perdesaan

ABSTRACT

This research was guided by implementation of local government policy on rural infrastructure program has not been optimized in Citapen Village, Cihampelas District, West Bandung Regency.

Theory that used in this research is (the theory of) policy implementation of Edwards III, especially the factors or crucial variables in the implementation of policies including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Based on the theoretical approach, the researcher formulates the proposition as follows:

1. Implementation of Local Government Policy in Improving Rural Infrastructure in Citapen Village, Cihampelas Sub District, West Bandung Regency is optimal through approach of policy implementation factors consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.
2. Inhibiting factors in the implementation of local government policy on Increasing Rural Infrastructure in Citapen Village, Cihampelas District, West Bandung Regency can be overcome by fulfillment of the demands and needs that support the implementation of the policy.
3. Efforts made by the Village Government in overcoming obstacles to the implementation of local government policy in improving rural infrastructure in Citapen Village conducted optimally in order to achieve the infrastructure expected by the community.

The research method used is descriptive with qualitative approach. Data obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation. Informant determination was done by purposive sampling technique.

The results of this study show that the Implementation of Local Government Policy on Improving Rural Infrastructure by the village community implementers Citapen Village Cihampelas District West Bandung Regency has not been optimized, which is the lack of time in disseminating policies with the village community, the low quality of human resources, coordination and difficulties in providing adequate material incentives, and the division of authority in the implementation of village rural infrastructure has not been accorded with its duties.

Keywords: implementation of the policy, local government, rural infrastructure.